
ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

Ana Rosita

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public Administration

Bureauratic Ehtics

Public Service

ABSTRACT

This study aims to find out how bureauratic ehtics are in public services in South Sumedang District, Sumedang Regency, what factorss hinder them, and how to overcome these obstacles. This Study used a qualitative research meethod with a descriptive analysis type. Informants were determined using a purposive sampling technique. With informants from the District Secretary, Head of the public service section, and Public Service Staff. Data collections techniques were carried out using literature studies, field studies (observations, interviews, and documentation) and triangulation. After that, data processing uses data collection, data reduction, data display, and conclusion or verification. The result of the study concluded that bureauratic ehtics are in public services at the South Sumedang District office, Sumedang Regency, had been crried out properly. This can be seen from Responsibility that there is still a lack of employee responsibility especially in internsnof supervision of procedures and thoroughness in cheking files. There are several obstacles regarding bureauratic ehtics are in public services, namely employees who pay less attention to the principles of professeionalism such as employees who are less copable in conveying directions to people who do not understand public services without paying attention to flow and rules that aply. While the effort are the competence of employees is encouraged by participating in regular training and encouraged by the imposition of strict sanctions and services to the community by means of direcristion and understanding which is ussually done once every 3 months. Based on the result of this study, it is suggested that socializations should be held regarding standart service rules for the community and service flow on social media such as instragram. The need to increase the implementation of activities such as training, guidance and other activities in improving both technical and non- technical abilities



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ana Rosita

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: rositaana086@gmail.com

1. INTRODUCTION

Praktek Penyelenggaraan pelayanan publik oleh birokrat belum terlaksanakan secara optimal dengan cepat, tepat, akurat, efisien dan berkualitas sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak birokrat yang seringkali bersikap arogan dan seolah apatis dengan menganggap bahwa masyarakatlah yang membutuhkan birokrat, sehingga berimbas pada etika pelayanan publik yang kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Selain itu, seringkali muncul berbagai masalah pada pelayanan publik yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrat, antara lain yaitu ketidakpastian waktu, biaya maupun etika pelayanan. Hal tersebut sering terjadi karena prosedur pelayanan tidak mengatur kewajiban dari pelayanan dan juga hak dari warga masyarakat sebagai pengguna pelayanan itu sendiri. Di samping itu juga sering melihat dan mendengar adanya tindakan pegawai yang kurang sopan, kurang ramah, dan ada juga tindakan yang bersifat diskriminatif. Sebagai Konsekuensi logisnya, hal inilah yang menjadi tugas pemerintah dalam meninjau kembali sistem pelayanan terutama pelayanan yang ada di daerah-daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik memerlukan etika yang baik. Menyadari bahwa pentingnya sikap dan perilaku beretika yang dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara, pemerintah berusaha menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika pegawai Negeri Sipil antara lain adalah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Bupati Sumedang nomor 14 Tahun 2019 pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara diantaranya menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur dan bahwa para Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi kode perilaku dan kode etik pegawai.

Beberapa pegawai di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan masih ditemukan melanggar disiplin kerja hal ini buktikan dengan data absensi pada bulan Oktober. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dan ketidaktepatan waktu dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan ini dianggap tidak beretika serta mencerminkan rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab profesional yang harus dijaga oleh setiap aparatur negara. Selain itu ketidakhadiran tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam beban kerja di antara pegawai. Pegawai yang hadir dan menjalankan tugas dengan baik merasa terbebani karena mereka harus menggantikan pekerjaan rekan-rekannya yang tidak hadir, hal tersebut menciptakan ketidakadilan dalam pembagian tugas meskipun keduanya menerima gaji yang sama.

Proses pelayanan kependudukan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan seringkali diidentikan dengan potensi pelanggaran etika. Saat ini terdapat kasus dimana masyarakat tidak dilayani dengan sikap ramah tamah dan hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Bagaimanapun situasi dan permasalahan yang dihadapi pegawai Kantor Kecamatan Sumedang Selatan harus tetap mematuhi standar etika pelayanan yang telah ditetapkan. Pegawai yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semestinya mendapatkan tindak lanjut, baik dalam bentuk sanksi maupun pembinaan. Namun kenyataannya langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga pelanggaran etika dalam pelayanan masih terjadi, kondisi ini perlu segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Pegawai Kecamatan Sumedang Selatan kurang kompeten dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat harus bulak balik karena tidak mengetahui syarat-syarat untuk mengurus keperluan.
2. Kurang pertanggung jawaban (responsibility) di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat harus menunggu tanda tangan dari camat untuk pemenuhan persyaratan keperluan, sehingga menjadikan pelayanan menjadi lebih lama.
3. Masih kurangnya kesetiaan (loyalty) pegawai di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya kerja pegawai yang tidak ada di meja pelayanan pada saat jam kerja, sehingga masyarakat harus menunggu dan menjadikan waktu pelayanan lebih lama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Etika Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
2. Faktor penghambat Etika Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat Etika Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

2. METHOD

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sugiyono (2017: 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Menurut Sugiyono (2018: 297), subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018: 301), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat agar dapat mengetahui etika birokrasi dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah
1	Sekretaris Camat	1
2	Ketua Seksi Pelayanan	1
3	Staff Pelayanan	2
Jumlah		4

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup fakta-fakta atau pun informasi tentang etika birokrasi dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, diperlukannya rincian data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018: 225) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Atau bisa dikatakan data primer adalah data yang langsung diamati dilapangan melalui wawancara mendalam dan data sekunder adalah data yang sudah dan dipublikasikan dari dokumen dan media pemberitaan resmi.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, disusun dengan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu.

1. Studi kepustakaan (*library*), yaitu memperoleh data secara langsung yang biasanya bersifat teoritis dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan tertulis berupa kebijakan-kebijakan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.
2. Studi lapangan
 - a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan juga berkompeten, khususnya dalam hal kinerja Kecamatan Sumedang Selatan dalam Program rantang simpati bagi lanjut usia miskin dan terlantar sebagai informan untuk memperoleh informasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam, dimana peneliti telah menyediakan instrumen penelitian

- berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kinerja Kecamatan Sumedang Selatan dalam Program rantang simpati bagi lanjut usia miskin dan terlantar.
 - d. Triangulasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Etika birokrasi merupakan bagian yang paling penting dalam memberikan suatu pelayanan dalam birokrasi pemerintahan. Dengan adanya etika birokrasi, maka suatu pelayanan di dalam birokrasi akan tersampaikan dengan baik dan dapat di terima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika suatu birokrasi memiliki etika birokrasi yang kurang dapat dengan mudah terjadinya mal administrasi dan mengganggu pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, etika birokrasi ini konon masih terus berdampingan dengan baik atau buruknya pelayanan tersebut dapat diberikan, banyak hal yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam birokrasi yang tidak dapat menyadari bahwa suatu pelayanan dapat dinilai baik buruknya jika pelayanan tersebut memiliki sumberdaya yang etika birokrasinya kurang bahkan di anggap jelek oleh masyarakat. Terlepas dari itu dalam memberikan pelayanan pun tidak terlepas dari budaya dan adat istiadat yang dibawa oleh sumber daya manusia itu sendiri atau pun adat istiadat dan budaya yang memang sudah menerap dalam birokrasinya.

Seperti halnya yang telah disebutkan di atas untuk menilai etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ini, maka harus adanya proses perbandingan atau penilaian yang dilakukan. Pengukuran atau perbandingan itu sendiri dilakukan melalui pengembangan indikator variabel penelitian, yang berkaitan dengan Etika Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Dalam melaksanakannya etika birokrasi perlu memerhatikan beberapa dimensi menurut Martins (dalam Yuniningsih 2017:293), sebagai berikut:

1. Persamaan (*Equality*)
2. Keadilan (*Equaty*)
3. Kesetiaan (*Loyalty*)
4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Etika pegawai dalam memberikan pelayanan publik di layani dengan baik dan tidak di beda-bedakan berdasarkan status sosial, ekonom, agama maupun pandangan politik masyarakat.
2. Pelayanan publik di kantor Kecamatan Sumedang Selatan telah berjalan dengan baik, ditandai dengan penerapan perlakuan adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, serta berlandaskan pada Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan juga tugas pokok serta fungsi yang jelas. Pegawai senantiasa menerapkan prinsip 5s (Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) dalam memberikan pelayanan. Selain itu, keberadaan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar tetap ramah, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.
3. Kecamatan Sumedang Selatan telah melakukan pelayanan dengan baik yaitu sesuai dengan SOP dan juga dengan adanya SK bupati tentang pelayanan publik. Pelayanan publik di Kecamatan Sumedang selatan sesuai dengan SK Bupati yaitu dengan 14 items rekomendasi pelayanan publik.
4. Pada dimensi pertanggung jawaban dapat dikatakan belum optimal bahwasannya masih kurangnya pertanggung jawaban pegawai terutama dalam hal pengawasan terhadap prosedur dan ketelitian dalam pengecekan berkas. Meskipun sebagian besar pegawai Kecamatan Sumedang Selatan telah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, masih diperlukannya peningkatan dalam aspek akurasi dan tanggung jawab kerja.

Etika birokrasi merupakan bagian yang paling penting dalam memberikan suatu pelayanan dalam birokrasi pemerintahan. Dengan adanya etika birokrasi, maka suatu pelayanan di dalam birokrasi akan tersampaikan dengan baik dan dapat di terima oleh masyarakat luas. Sebaliknya, jika suatu birokrasi memiliki etika yang kurang maka akan dengan mudah terjadinya mal administrasi dan mengganggu pelayanan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik etika birokrasi masih berdampingan dengan baik atau buruknya pelayanan tersebut diberikan, banyak hal yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam birokrasi yang tidak dapat menyadari bahwa suatu pelayanan dapat dinilai baik buruknya jika pelayanan tersebut memiliki sumber daya yang birokrasinya kurang bahkan di anggap jelek oleh masyarakat. Terlepas dari pada itu dalam memberikan pelayanan pun tidak terlepas dari budaya dan adat istiadat yang dibawa oleh

sumber daya manusia nya itu sendiri atau pun adat istiadat dan budaya yang memang sudah menerap dalam birokrasinya .

Sepertinya halnya yang telah disebutkan di atas untuk menilai etika birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ini maka harus adanya proses perbandingan atau penilaian yang dilakukan. Pengukuran atau perbandingan itu sendiri dilakukan melalui pengembangan indikator variabel penelitian, menjadi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Etika Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

4. CONCLUSION

Etika Birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berdasarkan penelitian dapat dikatakan belum baik. Hal ini dapat dilihat pada dimensi Pertanggung jawaban (*Responsibility*) bahwasannya masih kurangnya pertanggung jawaban pegawai terutama dalam hal pengawasan terhadap prosedur dan ketelitian dalam pengecekan berkas . Meskipun sebagian besar pegawai Kecamatan Sumedang Selatan telah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, masih diperlukannya peningkatan dalam aspek akurasi dan tanggung jawab kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar etika birokrasi seperti tanggung jawab belum sepenuhnya tertanam dalam budaya kerja pegawai. Kurangnya pengawasan terhadap prosedur serta minimnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen mencerminkan masih lemahnya komitmen terhadap standar pelayanan publik yang berkualitas . Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja internal, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan .

Faktor penghambat Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang berdasarkan penelitian yaitu masyarakat masih menerapkan budaya-budaya instan dimana mereka ingin menerima pelayanan dengan tidak memperhatikan alur dan aturan yang berlaku . Selain itu, pegawai kurang memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dimana ASN kurang kompeten dalam menyampaikan pengarahan kepada masyarakat yang kurang paham dalam pelayanan sehingga menyebabkan kurang lengkapnya persyaratan dan dokumen pendukung dalam pelayanan .

Dengan adanya hambatan pelaksanaan etika birokrasi maka diperlukan upaya untuk meningkatkan Etika Birokrasi dalam pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yaitu dengan memberikan sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali untuk membahas terkait pelayanan publik pada Kecamatan Sumedang Selatan. Kemudian untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip profesionalisme pegawai yaitu dengan pelatihan secara berkala bagi ASN sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat.

REFERENCES

- Afrizal, H. I. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* , 269-275.
- Alwany, Y. O. (2023). Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan* , 1-10.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Putaka Setia.
- Darmanto. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Banten: Universitas Terbuka.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gufron, U. (2017). Etika Birokrasi. *Jurnal Kajian Keislaman*, 221-246.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 48-58.
- Iskandar, J. (2020). Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1-10.
- J, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu (edisi ketiga)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo. (2013). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labolo, M. (2016). *Modul Etika Pemerintahan*. Sumedang: Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- M, T. (2008). *Etika Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashur Hasan Bisri, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 59-76.
- Miftah, T. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhaimin.Ghozali.Afida, H. (2023). Penerapan Etika Birokrasi dalam Kualitas Pelayanan Publik KPU Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 298-305.
- Mulyadi. (2021). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- P, S. S. (2004). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Shadan, K. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- Sinambela. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono. (2012). *Etika Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Bandung: Erlangga.
- Tamim, F. (2007). *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Triyuningsih. (2017). *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- V, R. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (2010). *Asas-asas Banajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniningsih. (2017). *Etika Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Yuniningsih. (2017). *Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-Universitas Diponegoro.